

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu tolok ukur yang sering dipakai untuk mengukur keberhasilan kondisi perekonomian di suatu daerah dari satu periode ke periode berikutnya disebut sebagai pertumbuhan ekonomi. Menurut Boediono dalam Tarigan (2006), membuat definisi bahwa pertumbuhan itu haruslah “bersumber dari proses intern perekonomian tersebut”. Hal penting yang perlu diperhatikan dalam ekonomi daerah, karena bisa saja suatu daerah mengalami pertumbuhan tetapi pertumbuhan itu tercipta karena banyaknya bantuan atau suntikan dana dari pemerintah pusat dan pertumbuhan itu terhenti apabila suntikan dana dari pemerintah pusat itu dihentikan. Dalam kondisi seperti ini sulit dikatakan ekonomi daerah itu bertumbuh, wajar apabila suatu daerah terbelakang mendapat bantuan atau suntikan dana dalam proporsi yang lebih besar dibandingkan daerah lainnya. Akan tetapi setelah jangka waktu tertentu, daerah itu mestinya tetap bisa bertumbuh walaupun tidak lagi mendapat alokasi yang berlebihan.

Pertumbuhan ekonomi daerah merupakan pertambahan pendapatan masyarakat secara keseluruhan yang terjadi di daerah tersebut, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah (*added value*) yang terjadi. Perhitungan pendapatan daerah pada awalnya dibuat dalam harga berlaku. Namun, untuk melihat pertambahan dari satu periode ke periode berikutnya harus dinyatakan dalam nilai riil, artinya dinyatakan dalam harga konstan (Tarigan, 2006). Keberhasilan pembangunan

ekonomi suatu daerah dapat diukur dengan indikator yang sering digunakan yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Nilai PDRB yang tinggi artinya kondisi perekonomian daerah tersebut baik, pertumbuhan ekonomi suatu daerah dikatakan mengalami peningkatan apabila dalam waktu tertentu barang dan jasa mengalami kenaikan, pertumbuhan ekonomi memiliki peran penting dalam menjelaskan tingkat pendapatan pribadi dan pembangunan daerah yang diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita. PDRB merupakan penjumlahan nilai seluruh sektor perekonomian daerah. Fluktuasi tahunan tingkat pertumbuhan riil perekonomian daerah ditunjukkan melalui presentasi PDRB atas dasar harga konstan.

Pertumbuhan ekonomi positif menunjukkan perubahan perekonomian, sedangkan pertumbuhan ekonomi negatif menunjukkan pengurangan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi sampai saat ini masih merupakan target utama pembangunan dalam rencana pembangunan daerah disamping pembangunan sosial, sedangkan target pertumbuhan tersebut ternyata sangat bervariasi sesuai dengan potensi ekonomi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Melalui pertumbuhan ekonomi daerah yang cukup tinggi diharapkan kesejahteraan masyarakat secara bertahap dapat ditingkatkan (Sjafrizal, 2008).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistika (BPS) tahun 2017 hingga tahun 2023, diketahui bahwa Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki pertumbuhan ekonomi yang mengalami kenaikan dan penurunan dalam kurun waktu 7 tahun terakhir yakni pada tahun 2017 hingga tahun 2023. Pertumbuhan

ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur dari tahun 2017 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 5,17%, peningkatan pembentukan modal tetap bruto dan konsumsi rumah tangga seiring dengan peningkatan impor barang modal maupun konsumsi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri menyebabkan PDRB Provinsi NTT tergerus dan perekonomian tidak mampu tumbuh lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2018 pertumbuhan ekonomi NTT sebesar 5,13% lebih rendah dibandingkan tahun 2017 yang tumbuh sebesar 5,16%, disisi produksi pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 12,16%. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen konsumsi lembaga non profit rumah tangga sebesar 9,76%. Lalu pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomi NTT tumbuh sebesar 5,24%. Disisi produksi, pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan industri pengolahan sebesar 9,14% dan disisi pengeluaran, dicapai oleh komponen konsumsi rumah tangga sebesar 5,40%. Namun, di tahun 2020 pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi sebesar 0,83% sebagai dampak dari pandemi COVID-19. Lalu pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi NTT mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan seiring dengan upaya pemerintah mendorong investasi dan konsumsi untuk mengendalikan pandemi Covid-19.

Pertumbuhan ekonomi NTT tahun 2022-2023 menunjukkan pemulihan yang cukup baik. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya pemulihan ekonomi yang dilakukan pemerintah membuahkan hasil. Dari sisi pengeluaran, peningkatan kinerja perekonomian NTT pada tahun 2023 didorong oleh

meningkatnya PMTB (Pembentukan Modal Tetap Bruto) dan pengeluaran pemerintah seiring dengan perhelatan ASEAN *Summit* 2023 di Labuan Bajo dan terus berlanjutnya pembangunan PSN bendungan maupun proyek peningkatan infrastruktur jalan daerah, serta kuatnya konsumsi rumah tangga di tengah pencabutan penetapan status pandemi Covid-19 dan persiapan menyambut tahun politik 2024. Di sisi lain, kinerja net impor juga mengalami peningkatan sejalan dengan upaya pemerintah untuk menjaga konsumsi masyarakat di tengah tekanan harga komoditas pangan melalui stabilitas harga dan pasokan. Sementara itu, di sisi Lapangan Usaha, pertumbuhan LU utama (LU Perdagangan, LU Konstruksi, LU Pertanian dan LU Administrasi Pemerintah) diperkirakan menjadi sumber utama menguatnya perekonomian NTT pada keseluruhan tahun 2023 (Bank Indonesia, 2023). Berikut ini merupakan tabel data pertumbuhan ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Timur periode tahun 2017 hingga tahun 2023:

Tabel 1.1
Data Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur
Periode Tahun 2017-Tahun 2023

No.	Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (%)
1	2017	5,16
2	2018	5,13
3	2019	5,24
4	2020	-0,83
5	2021	2,51
6	2022	3,05
7	2023	3,52

Sumber data: *BPS, Provinsi NTT tahun, 2023*

Menurut Keynes dalam Sukirno (2012), PDB terbentuk dari empat faktor yang secara positif mempengaruhinya, keempat faktor tersebut adalah

konsumsi (C), investasi (I), pengeluaran pemerintah (G) dan ekspor bersih (NX). Sebagian dari pengeluaran pemerintah digunakan untuk membiayai administrasi pemerintahan dan sebagian lainnya adalah untuk membiayai kegiatan pembangunan, membayar gaji pegawai-pegawai pemerintah, membiayai sistem pendidikan dan kesehatan rakyat, membiayai perbelanjaan untuk angkatan bersenjata dan membiayai berbagai jenis infrastruktur. Perbelanjaan-perbelanjaan tersebut akan meningkatkan pengeluaran agregat dan meningkatkan kegiatan ekonomi negara.

Konsumsi yang telah digunakan oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhan mempunyai dampak yang sangat kuat terhadap pertumbuhan ekonomi. Penurunan konsumsi yang digunakan oleh masyarakat akan mempengaruhi rendahnya nilai GDP yang akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi suatu daerah dan pertumbuhan ekonomi akan menurun. Dalam jangka pendek, terutama selama terjadinya resesi ekonomi konsumsi memegang peranan yang sangat penting dan pengaruh konsumsi juga sangat diperlukan guna menstabilkan perekonomian dan mencegah terjadinya perekonomian yang lebih buruk untuk kedepannya (Sanjani, Muhammad Rafi'i, 2024).

Peruntukan pengeluaran pemerintah untuk infrastruktur memegang kontribusi strategis dengan harapan dapat meningkatkan daya saing, mendorong pertumbuhan ekonomi, mewujudkan pemerataan perekonomian nasional dan daerah, serta memajukan kesejahteraan rakyat secara keseluruhan Christelis et al., dalam (Saputro et al., 2022). Untuk itu, diperlukan kebijakan untuk meningkatkan jumlah dan mutu belanja pemerintah di sektor-sektor produktif

dengan tujuan meningkatkan laju perekonomian nasional dan pemerataan pembangunan antar daerah di Indonesia. Ada lima faktor utama yang menyebabkan peningkatan pengeluaran pemerintah: (1) tuntutan peningkatan perlindungan keamanan dan pertahanan, (2) peningkatan tingkat pendapatan masyarakat, (3) urbanisasi yang mengiringi pertumbuhan ekonomi, (4) perkembangan demokrasi dan (5) pemborosan birokrasi yang mengiringi pembangunan pemerintah. Kebijakan pengeluaran publik mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Misalnya, belanja sosial memberikan tingkat pendapatan minimum dan meningkatkan akses ke layanan publik yang berharga. Dalam jangka pendek, pengeluaran publik untuk transfer tunai secara langsung mengurangi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Dalam jangka panjang, bantuan tunai terutama jika ditujukan kepada masyarakat miskin dapat meningkatkan pertumbuhan dan hasil distribusi karena dampak positifnya terhadap sumber daya manusia anak-anak dari latar belakang yang kurang beruntung Christelis et al., dalam (Saputro et al., 2022).

Investasi yang memadai akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi secara umum semakin banyak modal yang tersedia, semakin banyak investor menanamkan modal maka akan meningkatkan produksi. Apabila produksi meningkat maka pendapatan yang dibayarkan kepada negara akan meningkat (Riznaky Roosmanita, 2022). Banyaknya investasi dapat dilihat dari Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Pembentukan Modal Tetap Bruto merupakan pengeluaran berupa barang modal yang waktu penggunaannya

diatas satu tahun dan bukan merupakan barang konsumsi yang meliputi gedung, mesin serta perlengkapan, peralatan lainnya, CBR serta produk kekayaan intelektual (Nur Lestari et al., 2021). PMTB memiliki tujuan untuk meningkatkan nilai produksi yang lebih banyak, sehingga dapat mendorong peningkatan pendapatan. Jika pembentukan modal tetap bruto tercukupi maka akan membantu perkembangan perekonomian yang berimbas terjadinya pertumbuhan perekonomian daerah (Riani & Nelvia Iryani, 2023).

Berikut tabel data pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran pemerintah dan pembentukan modal tetap bruto di Provinsi Nusa Tenggara Timur periode tahun 2017 hingga tahun 2023:

Tabel 1.2
Data Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan
Menurut Pengeluaran (Triliun Rupiah)

No.	Tahun	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	Pengeluaran Pemerintah	Pembentukan Modal Tetap Bruto
1	2017	48.369.640,96	17.065.227,99	30.527.236,74
2	2018	50.523.143,00	18.092.134,73	32.035.755,03
3	2019	53.250.488,08	18.515.219,59	33.794.457,09
4	2020	52.377.887,00	16.176.763,29	30.989.781,75
5	2021	53.207.901,27	15.365.330,32	32.473.641,67
6	2022	54.675.338,98	14.833.114,61	32.304.850,17
7	2023	55.904.884,56	15.252.711,78	34.368.366,28

Sumber data: BPS, Provinsi NTT tahun, 2023

Tabel 1.2 menggambarkan tren pertumbuhan yang berbeda-beda, pengeluaran konsumsi rumah tangga di NTT dipengaruhi oleh kombinasi faktor ekonomi, sosial dan lingkungan. Secara keseluruhan pengeluaran konsumsi rumah tangga di NTT menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2017 hingga 2023, meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2020 akibat pandemi

Covid-19. Peningkatan yang konsisten pada tahun-tahun terakhir menunjukkan adanya pemulihan dan pertumbuhan yang positif mencerminkan perbaikan kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pada tahun 2017 hingga tahun 2019 nilai pengeluaran konsumsi rumah tangga relatif stabil didominasi oleh komponen terbesar adalah pengeluaran untuk makanan dan minuman, pengeluaran untuk perumahan, listrik, air dan bahan bakar serta sektor lainnya seperti transportasi, kesehatan dan pendidikan masing-masing berkontribusi antara 5-10% dari total pengeluaran. Nilai pengeluaran konsumsi rumah tangga tertinggi pada tahun 2019 mencapai Rp 53.250.488,08 triliun mengalami peningkatan sekitar Rp 2,73 triliun atau sekitar 5,4% dari tahun 2018, lalu pada tahun 2020 nilai pengeluaran konsumsi rumah tangga sebesar Rp 52.377.887,00 triliun mengalami penurunan akibat pandemi Covid-19 yang mempengaruhi aktivitas ekonomi masyarakat. Selanjutnya, pada tahun 2021 sebesar Rp 53.207.901,27 triliun, hal ini menunjukkan pemulihan ekonomi yang mulai terjadi. Lalu, pada tahun 2022 sebesar Rp 54.675.338,98 triliun dan ditahun 2023 nilai pengeluaran konsumsi rumah tangga sebesar Rp 55.904.884,56 triliun, angka ini menunjukkan peningkatan yang konsisten di sektor konsumsi rumah tangga di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pengeluaran pemerintah menunjukkan peningkatan yang signifikan selama periode 2017-2019, dalam hal upaya pemerintah dalam meningkatkan investasi publik dan pelayanan kepada masyarakat, seperti pada tahun 2019 yaitu mencapai Rp 18.515.219,59 triliun tertinggi selama periode tersebut. Namun, terjadi penurunan pada tahun 2020-2022 yang disebabkan oleh dampak

pandemi Covid-19 dan kembali menunjukkan peningkatan pada tahun 2023 mencapai Rp 15.252.711,78 triliun. Komposisi belanja pemerintah NTT sebagian besar terdiri dari belanja pegawai (sekitar 45-50%), kemudian diikuti oleh belanja barang dan jasa serta belanja modal.

Pembentukan Modal Tetap Bruto juga menunjukkan tren pertumbuhan yang positif sepanjang tahun 2017 hingga tahun 2019 meskipun dengan hasil yang berbeda dibandingkan dengan pengeluaran pemerintah dengan adanya investasi yang lebih besar dalam infrastruktur dan sektor produktif lainnya di NTT. Pada tahun 2019, pembentukan modal tetap bruto memberikan kontribusi terbesar kedua mencapai Rp 33.794.457,09 triliun atau sekitar 46,6 persen, lalu pada tahun 2020 mencapai Rp 30.989.781,75 triliun mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya, selanjutnya pada tahun 2021 hingga tahun 2023 peningkatan terus terjadi pasca pandemi Covid-19. Investasi dalam sektor bangunan dan konstruksi merupakan bagian terbesar dari PMTB di Provinsi NTT. Sektor-sektor unggulan yang mendorong perkembangan PMTB meliputi konstruksi, pertanian, serta perdagangan dan perbaikan. Peningkatan ini dapat dihubungkan dengan upaya pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Menurut Rafiq dalam Raskina & Saharuddin, (2023), konsumsi merupakan pendapatan yang dibelanjakan sektor rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa. Tidak hanya itu, konsumsi juga digunakan oleh rumah tangga sebagai investasi pembayaran pajak pada pemerintah. Konsumsi masyarakat pun nantinya akan berpengaruh pada

pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Karena konsumsi merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi permintaan akan pengeluaran.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sabyan, Muhammad, Amrizal (2022), menunjukkan bahwa secara parsial hanya variabel pengeluaran konsumsi rumah tangga yang berpengaruh signifikan terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Sri & Evi (2021), dengan metode yang akan digunakan diantaranya adalah analisa model linier berganda dan uji statistik menunjukkan bahwa secara parsial variabel konsumsi rumah tangga berkorelasi negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Penelitian yang dilakukan Rustiono dalam Wahana (2020), menggunakan metode asosiatif dengan pendekatan eksperimen dan analisis regresi linier berganda menyatakan bahwa pengeluaran konsumsi pemerintah yang terlalu kecil akan merugikan pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah yang proporsional akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran konsumsi pemerintah yang boros akan menghambat pertumbuhan ekonomi.

Pada umumnya pengeluaran pemerintah membawa dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Buana et al., (2019), menunjukkan bahwa secara parsial dan simultan pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Hasibuan (2022),

menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah tidak memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Menurut Taufiq dalam Nirmala et al., (2022), investasi dapat dikatakan sebagai mesinnya pertumbuhan setiap negara (*engine of growth*). Investasi adalah yang membuat suatu negara bergerak yakni akan bertumbuh dan berkembang seiring dengan investasi yang ada dalam negaranya tersebut. Untuk melihat seberapa besar investasi itu bisa dilihat dari komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB).

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Khaidarsyah & Muthahharah (2022), menjelaskan bahwa Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) memiliki hubungan yang kuat terhadap laju pertumbuhan ekonomi. Lain halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Nur Lestari et al., (2021), menjelaskan terjadinya pelemahan untuk mesin dan kendaraan, sehingga pembentukan modal tetap bruto tidak memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang terjadi, perlu dilakukan penelitian dengan judul **“Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Pengeluaran Pemerintah dan Pembentukan Modal Tetap Bruto Sebagai Determinan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Timur”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana gambaran pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran pemerintah, pembentukan modal tetap bruto dan pertumbuhan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur?
2. Apakah pengeluaran konsumsi rumah tangga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur?
3. Apakah pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur?
4. Apakah pembentukan modal tetap bruto berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur?
5. Apakah pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran pemerintah dan pembentukan modal tetap bruto secara simultan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini yaitu, untuk:

1. Mengetahui gambaran pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran pemerintah, pembentukan modal tetap bruto dan pertumbuhan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur
2. Mengetahui pengeluaran konsumsi rumah tangga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur
3. Mengetahui pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur

4. Mengetahui pembentukan modal tetap bruto berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur
5. Mengetahui pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran pemerintah dan pembentukan modal tetap bruto secara simultan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur

1.4 Manfaat Penelitian

Diharapkan hasil penelitian ini dapat membawa manfaat sebagai berikut di masa yang akan datang.

1. Penerapan praktis bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber yang berharga untuk mengaplikasikan dan memperdalam pengetahuan yang dimiliki. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini tidak hanya menjadi referensi, tetapi juga alat yang mendorong pengembangan keterampilan dan wawasan penulis.
2. Bagi Pemerintah Daerah, hasil penelitian ini akan membantu pemerintah daerah Nusa Tenggara Timur untuk merancang kebijakan perekonomian yang lebih efektif agar alokasi anggaran tepat sasaran untuk program-program yang terbukti memberikan dampak positif yang signifikan.
3. Manfaat Akademik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi untuk penelitian selanjutnya dan memberikan kontribusi dalam penelitian dan pengembangan.